

Evaluasi Pemanfaatan BLT-Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem: Studi Kasus di Wilayah Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor

Muhammad Dimas Tri Raharjo*, Edy Sutrisno, Mala Sondang Silitonga

Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA-LAN Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: dimastriraharjo@gmail.com

Raharjo M. D. T., Sutrisno, E., & Silitonga, M. S. (2026). Evaluasi Pemanfaatan BLT-Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem: Studi Kasus di Wilayah Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. *Varied Knowledge Journal*, 4(1), 723–738. <https://doi.org/10.71094/vkj.v4i1.293>

Diterima : 12-06-2026

Direvisi : 13-08-2026

Disetujui : 15-08-2026

Publish : 19-08-2026



Copyright © 2026, The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Abstract: Achieving the national target of zero-percent extreme poverty by the end of 2024 faces persistent regulatory and implementation hurdles. This phenomenon reflected in Cileuksa Village, Bogor Regency, which remains trapped within the "Bogor Paradox" the survival of poverty pockets amidst rapid regional economic growth. This study evaluates the effectiveness of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-Dana Desa) on the consumption of extreme poverty Beneficiary Groups (KPM) and dissects underlying structural factors. Methodologically, it employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design. The quantitative phase examines secondary data via linear regression, while the qualitative phase analyzes the implementation context through interviews and field observations based on Merilee S. Grindle and Martin Ravallion's frameworks, validated via data triangulation. Quantitative findings indicate BLT-Dana Desa can't explain inter-household consumption variability due to uniform assistance amounts, though it remains a crucial basic economic cushion. Meanwhile, qualitative analysis confirms a geographic poverty trap; funds are depleted for short-term consumption due to low capital productivity driven by physical isolation, post-disaster ecological vulnerability, and weak village-level data governance. In conclusion, BLT-Dana Desa serves as an effective temporary safety net but fails to structurally graduate beneficiaries. Recommendations include reformulating adaptive Village Fund allocations and transforming aid into area-based productive economic empowerment.

Keywords: Village Funds, Extreme Poverty, Bogor Paradox, Sequential Explanatory Mixed Method

Abstrak: Pencapaian target nol persen kemiskinan ekstrem nasional pada akhir 2024 masih menghadapi kendala regulasi dan implementasi. Fenomena ini tercermin di Desa Cileuksa, Kabupaten Bogor, yang terjebak dalam "Paradoks Bogor" berupa bertahannya kantong kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas BLT-Dana Desa terhadap konsumsi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) kemiskinan ekstrem, serta membedah faktor struktural penyebab perangkat kemiskinan tersebut. Secara metodologis penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan desain Sekuensial Eksplanatoris. Tahap kuantitatif menguji data sekunder melalui analisis regresi linear. Tahap kualitatif mendalami konteks implementasi melalui wawancara dan observasi berdasarkan model kebijakan publik Merilee S. Grindle dan Martin Ravallion, yang divalidasi menggunakan teknik triangulasi data. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan BLT-Dana Desa tidak dapat menjelaskan variabilitas konsumsi antar-rumah tangga karena nominal bantuan yang seragam, meski secara riil tetap krusial sebagai bantalan ekonomi dasar. Sementara itu, analisis kualitatif membuktikan keberadaan perangkat kemiskinan geografis (*geographic poverty trap*). Dana bantuan habis untuk konsumsi jangka pendek akibat rendahnya produktivitas modal yang tertekan oleh isolasi fisik, kerentanan ekologis pasca-bencana, serta lemahnya tata kelola pembersihan data penargetan di tingkat pemerintahan desa. Kesimpulan menunjukkan BLT-Dana Desa efektif sebagai jaring pengaman instan, namun gagal menggraduasi KPM secara struktural. Rekomendasi yang dimungkinkan berupa reformulasi Alokasi Dana Desa yang adaptif serta transformasi skema bantuan menuju pemberdayaan ekonomi produktif berbasis karakteristik wilayah.

Kata Kunci: Dana Desa, Kemiskinan Ekstrem, Paradoks Bogor, Sequential Explanatory Mixed Method

PENDAHULUAN

Pencapaian target tingkat kemiskinan ekstrem sebesar nol persen secara absolut pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) masih menyisakan berbagai persoalan mendasar di tingkat regulasi maupun operasional lapangan. Data menunjukkan bahwa rasio kemiskinan ekstrem nasional pada Maret 2024 masih bertahan pada kisaran 0,83% hingga 0,85% (Wibisono, 2025). Lebih lanjut dikatakan bahwa kegagalan mencapai target absolut ini menuntut adanya dekonstruksi ilmiah yang mendalam terhadap interaksi kebijakan fiskal pusat dengan eksekusi otonom di tingkat desa.

Secara multidimensi, dinamika pembangunan nasional kerap dihadapkan pada guncangan eksternal yang tidak terprediksi. Pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah melakukan reorientasi kebijakan fiskal secara masif dari pemberdayaan struktural menjadi skema jaring pengaman sosial darurat (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025). Selain itu, fenomena iklim *El-Nino* yang meningkatkan suhu muka air laut secara tidak normal turut mendepresiasi produktivitas sektor pertanian primer di perdesaan, memicu lonjakan harga pangan, dan memperparah kerentanan sosial-ekonomi penduduk pada kelompok kesejahteraan Desil-1 hingga Desil-3 (Ibrahim et al., 2024).

Ibrahim et.al (2024) melanjutkan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk pendistribusian beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), masih menemui kendala akurasi target sasaran. Penggunaan basis data ganda seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN dinilai belum optimal akibat adanya disparitas data administratif dengan kondisi riil di lapangan. Ariansyah dkk. (2025) menyampaikan bahwa hal ini memicu kesalahan penargetan berupa *exclusion error* (penduduk miskin tidak terdaftar) dan *inclusion error* (kelompok relatif mampu menerima bantuan).

Mara & Rambey (2018) melanjutkan bahwa determinan struktural lainnya berupa ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur melalui *Gini Ratio*. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kesenjangan pendapatan ekstrem mencerminkan inefisiensi ekonomi dan melemahnya stabilitas sosial. Lestari (2023) mengungkapkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas, dan kemiskinan membentuk segitiga kausalitas yang kompleks. Pertumbuhan ekonomi makro yang tinggi sering kali berjalan beriringan dengan persistensi kantong kemiskinan ekstrem akibat tersumbatnya efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*). Badan Pusat Statistik, (2025) merilis bahwa pada kuartal pertama tahun 2020, kontraksi ekonomi nasional sebesar -2,7% memicu peningkatan *Gini Ratio* dari 0,381 menjadi 0,385, yang mencerminkan penurunan pendapatan yang lebih curam pada kelompok rentan dibanding kelompok elit. Di sisi lain, meskipun pertumbuhan ekonomi pulih ke kisaran 5,1% pada periode 2024-2025, kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan tetap kontras. Oktaviani et al., 2025 kemudian menyampaikan bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan per September 2025 tercatat sebesar 10,72%, sedangkan di perkotaan hanya 6,60%.

Secara teoretis-konseptual, (TNP2K, 2024) menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari kemiskinan umum. Namun, (Andrianto, 2026) menanggapi bahwa secara praktis-operasional, keduanya merupakan entitas berbeda yang membutuhkan penanganan kebijakan yang berlainan. Husanatariana et al., (2024) menambahkan bahwa kelompok miskin ekstrem dicirikan oleh kemiskinan kronis struktural, deprivation ganda, serta keterbatasan kapasitas fisik (seperti lansia tunggal dan disabilitas). Sementara itu, (Utomo, 25 C.E.) turut menambahkan bahwa kemiskinan umum didominasi oleh kelompok transisional yang sangat sensitif terhadap

inflasi jangka pendek. Alfirman et al., (2024) menjelaskan bahwa standar kemiskinan ekstrem juga mengalami perluasan cakupan seiring penyesuaian batas paritas daya beli dari US\$ 1,90 PPP menjadi US\$ 2,15 PPP. Standar baru ini mengonversi rasio kontribusi kemiskinan ekstrem terhadap total kemiskinan nasional melonjak menjadi 14,12% pada Maret 2024.

Secara konteks lokus kebijakan, terdapat dikotomi fundamental antara penentuan wilayah prioritas berdasarkan kualitas (persentase) atau kuantitas (jumlah absolut) penduduk miskin sebagaimana yang disampaikan (Kemenko PMK, 2024). Merujuk pada pemikiran Martin Ravallion, wilayah dengan populasi besar memberikan kontribusi yang jauh lebih signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan nasional (Suryadi, 2022). Hasyiyati & Holis (2025) menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah merupakan penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun sekaligus menjadi kantong populasi miskin ekstrem terbesar secara absolut di Indonesia. Sebagai ilustrasi, jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat mencapai 569.000 jiwa, jauh melampaui gabungan wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang hanya berkisar 158.500 jiwa.

Kabupaten Bogor menampilkan anomali spasial-ekonomi yang dikenal sebagai "Paradoks Bogor". Kabupaten ini merupakan penerima alokasi Dana Desa terbesar di Jawa Barat, yakni mencapai Rp589,2 miliar pada tahun 2023 (Kemendesa PDT, 2023). Namun, di balik kucuran fiskal yang masif dan persentase kemiskinan daerah yang tampak rendah (6,25% estimasi pada tahun 2025), Kabupaten Bogor menyandang status sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin absolut tertinggi secara nasional, yakni mencapai 401,86 ribu jiwa menurut data BPS atau 446.790 jiwa berdasarkan data internal daerah (Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025). Pada tingkat mikro, fenomena ini melahirkan "paradoks mikro" di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya. Desa ini menerima alokasi anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tertinggi di Kecamatan Sukajaya, namun jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di desa tersebut stagnan pada angka 82 KPM sepanjang periode 2023-2024 (Kemendesa PDT, 2024). Kondisi *steady state* ini mengindikasikan adanya kemacetan graduasi mandiri dan potensi perangkap ketergantungan (*dependency trap*).

Tabel 1. Tinjauan Komparatif Penelitian Terdahulu terkait Dana Desa dan Kemiskinan

Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode Analisis	Temuan Utama	Relevansi dengan Studi Ini
Fadilla et al. (2023)	Tata kelola Dana Desa dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor	Deskriptif kuantitatif	Pengelolaan yang baik berkorelasi positif dalam mereduksi jumlah penduduk miskin	Menjadi acuan awal analisis tata kelola anggaran di lokus Kabupaten Bogor
Nurhidayat (2018)	Pengaruh belanja desa terhadap kemajuan sektor pendidikan dasar di Desa Babakan Sadeng	Regresi linear sederhana, uji t, dan uji determinasi (R^2)	Eskalasi realisasi belanja desa berkontribusi meningkatkan kemajuan pendidikan dasar	Menunjukkan urgensi alokasi anggaran desa pada sektor pembangunan SDM non-sosial
Yusniati et al. (2019)	Pengaruh ADD dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan kabupaten di Provinsi Aceh	Kuantitatif deskriptif	Alokasi Dana Desa bidang pembangunan menurunkan kemiskinan; PDRB tidak berpengaruh signifikan	Memperkuat dasar pemisahan pengaruh anggaran sektoral terhadap indikator kemiskinan
Handra (2022)	Dampak Dana Desa terhadap kemiskinan, pengangguran, dan pelayanan publik nasional	Analisis multivariat / regresi berganda	Dana Desa secara signifikan meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 1,25%	Menjadi rujukan pembandingan efek makro anggaran terhadap pengeluaran rumah tangga
Arfiansyah	Dampak Dana Desa dalam	Deskriptif	Alokasi Dana Desa dan	Menyoroti

Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian	Metode Analisis	Temuan Utama	Relevansi dengan Studi Ini
(2020)	penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah	kuantitatif, regresi data panel	pertumbuhan secara mempercepat kemiskinan	ekonomi simultan penurunan kesenjangan metodologis (research gap) dalam efektivitas riil anggaran di tingkat mikro
Ibrahim et al. (2024)	Evaluasi bantuan CPP dalam mitigasi dampak El-Nino di Flores Timur	Kualitatif studi kasus dengan pendekatan metode SMART	Akurasi data P3KE lemah di lapangan; bantuan tunai memicu ketergantungan konsumtif KPM	Mendasari analisis kualitatif mengenai bias data penargetan dan perangkap ketergantungan sosial

Merujuk pada persoalan yang telah disampaikan di atas serta komparasi terhadap penelitian terdahulu yang sejenis, maka rumusan masalah yang mungkin melalui hipotesis awal berupa ada atau tidaknya pengaruh dari pemberian BLT-Dana Desa terhadap kecukupan pengeluaran minimum konsumsi masyarakat miskin ekstrem yang terkategori KPM BLT-Dana Desa di Desa Cileuksa, kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimana implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Cileuksa dilihat dalam perspektif teori *content of policy* kebijakan Grindle khususnya pada aspek manfaat kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat dan letak pengambilan keputusan serta melihat pada sudut pandang kemiskinan akibat kondisi geografis dalam teori kebijakan Martin Ravallion, serta bagaimana strategi kebijakan yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di desa tersebut. Hal ini mendorong untuk dapat menganalisis pengaruh kontribusi dari kebermanfaatan pemberian BLT Dana Desa, membedah secara dua perspektif pengaruh kepentingan para aktor birokrat terkait kebijakan pemanfaatan Dana Desa bagi penanganan kemiskinan ekstrem dengan adanya Dana Desa dan BLT- Dana Desa serta perspektif kondisi spasial, ekologi dan ekonomi di Desa Cileuksa, juga perlunya menyusun sebuah strategi konkret kebijakan berupa penentuan formulasi perhitungan pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan mengadopsi formulasi perhitungan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, hal ini sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Desa dan PDT tentang Fokus Penggunaan Dana Desa.

Penyusunan laporan penelitian ini bersandar pada kerangka kebijakan nasional yang mencakup Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, di mana penanganan kemiskinan diklasifikasikan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia melalui perlindungan sosial. Pada masa darurat, regulasi payung hukum seperti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020, PP Nomor 43 Tahun 2020, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 menjadi basis legal pergeseran prioritas penggunaan Dana Desa untuk skema jaring pengaman sosial, termasuk kewajiban pengalokasian BLT-Dana Desa. Namun, fluktuasi peningkatan pagu Dana Desa pasca-pandemi tidak serta-merta diikuti oleh penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat lapangan. Hal ini mendorong pentingnya melakukan pengujian empiris terhadap efektivitas program perlindungan sosial di tingkat perdesaan peri-urban rawan bencana.

Alur penelitian ini berawal dari regulasi mengenai kebijakan dan fiskal terhadap prioritas penggunaan Dana Desa dan alokasi BLT-Dana Desa serta Data dan Parameter menggunakan Data By Name By Address yang dirilis oleh pihak Kemensos RI dan Kemendesa PDT serta Data Desil 1 yang di keluarkan pihak P3KE, Kemenko PMK, untuk kemudian dianalisis menggunakan model ekonometrika model regresi dan korelasi yang menghasilkan 2 model, model 1 pengujian dampak

BLT-Dana Desa terhadap pengeluaran konsumsi harian masyarakat miskin ekstrem dan model 2 pengujian pengaruh total pendapatan masyarakat miskin ekstrem terhadap pengeluaran konsumsi hariannya, hasil pengujian tersebut di analisis berdasarkan tata kelola penyaluran ADD/BLT Dana Desa serta kondisi Sosio-Ekologis merujuk pada teori Grindle dan Martin Ravallion, sehingga menghasilkan *outoput* berupa besaran efektivitas kontribusi BLT Dana Desa terhadap ketercukupan konsumsi harian minimum masyarakat miskin ekstrem, dekonstruksi ilmiah penyebab “paradoks bogor” di Desa Cileuksa merujuk pada analisis tata kelola ADD/BLT-Dana Desa dan kondisi Sosio-Ekologisnya, dan menginisiasi rekomendasi kebijakan berupa re-formulasi pagu Dana Desa dan transformasi jaring pengaman sosial produktif.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan rancangan metode campuran sekuensial eksplanatoris (*Explanatory Sequential Mixed Method*). Berdasarkan karakteristik desain hibrida ini, proses investigasi empiris diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif pada fase pertama (sebagai instrumen filter primer). Hasil estimasi statistik tersebut kemudian ditindaklanjuti, diperdalam, dan dikonfirmasi melalui pengumpulan serta analisis data kualitatif pada fase kedua sebagai metode sekunder. Langkah ini bertujuan membongkar faktor kausalitas sosial, hambatan birokrasi, serta perangkat spasial yang tidak mampu terekam secara utuh oleh angka statistik.

Lokus penelitian secara sengaja (*purposive*) ditetapkan di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Cileuksa merupakan wilayah peri-urban dengan tingkat kerentanan ekologis tinggi (rawan bencana pergerakan tanah) serta mencatatkan jumlah KPM BLT-Dana Desa konstan tertinggi (82 KPM) di Kecamatan Sukajaya selama periode anggaran 2023-2024. Waktu pelaksanaan penelitian lapangan dan pengumpulan data primer dilakukan pada tahun 2026, sedangkan data keuangan dan kependudukan periodik mencakup rentang waktu 2023-2024.

Populasi sasaran dalam tahap pengujian kuantitatif adalah seluruh kepala keluarga miskin ekstrem yang terdaftar dalam basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil-1 di Desa Cileuksa. Penentuan ukuran sampel minimal dihitung menggunakan Rumus Slovin dengan jumlah populasi sebanyak 82 KPM miskin ekstrem, dan derajat kesalahan sebesar 5%.

$$n_{ME} = \frac{N_{ME}}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

- n_{ME} = jumlah sampel Miskin Ekstrem
- N_{ME} = jumlah Populasi Miskin Ekstrem
- e^2 = derajat kesalahan/ *Margin of Error*

Melalui kalkulasi matematis diperoleh:

$$n_{ME} = \frac{82}{1 + 82 \times (0,05^2)} = \frac{82}{1 + 0,205} = \frac{82}{1 + 0,205} = 68,05 \sim 68$$

Penarikan sampel dari kerangka data P3KE Desil-1 dilakukan menggunakan teknik acak sederhana (*Simple Random Sampling*) guna menjamin keadilan peluang bagi setiap unit observasi.

Pada tahap analisis kualitatif, sampel informan ditetapkan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling* dengan pendekatan *Purposive Sampling*. Kriteria informan kunci (*key informants*) dipilih secara sengaja berdasarkan kapasitas regulatif, administratif, dan sosiologis di

lapangan yang berjumlah masing-masing 1 personel yang di asumsikan merupakan representasi dari keterwakilan informan:

1. ASN Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan) selaku representasi pembuat kebijakan fiskal nasional;
2. ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor selaku pembina teknis dan pengawas APBDes daerah;
3. Kepala Desa Cileuksa selaku administrator tapak dan pengambil keputusan operasional;
4. KPM BLT-Dana Desa di Desa Cileuksa yang tergolong dalam status kemacetan graduasi ekonomi.

Teknik pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner terstruktur tertutup untuk mengukur nominal bantuan (X_1), total pendapatan bulanan (X_2), dan pengeluaran konsumsi minimum (Y). Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi fisik lingkungan rawan bencana, serta studi dokumentasi Data Desa Cileuksa.

Pengolahan data kuantitatif dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik untuk menguji asumsi klasik dan melakukan estimasi parameter regresi linear sederhana. Pengolahan data kualitatif bersandar pada alur analisis Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data (penyaringan transkrip wawancara berdasarkan variabel Grindle dan Ravallion), penyajian data dalam bentuk matriks komparasi, serta penarikan kesimpulan melalui proses triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis, Demografi, dan Sektoral Wilayah

Desa Cileuksa secara geografis terletak pada elevasi berkisar antara 600 meter hingga 925 meter di atas permukaan laut (dpl) di kaki Gunung Halimun (Ruhyadi, 2019). Wilayah desa ini mencakup luas keseluruhan sebesar 2.475,60 hektar (Ha) dengan topografi didominasi oleh perbukitan terjal dan lereng curam yang labil. Batas administratif Desa Cileuksa berbatasan langsung dengan entitas wilayah tetangga yang dirinci dalam Tabel 2.

Tabel 2. Batas Administrasi Kewilayahan Desa Cileuksa

Batas Wilayah	Entitas Batas Adminsitratif	Keterangan
Batas Utara	Desa Pasirmadang, Kec. Sukajaya	Batas internal dalam satu kecamatan
Batas Timur	Desa Wirajaya, Kec. Jasinga	Batas antar kecamatan di Kab. Bogor
Batas Selatan	Desa Cisarua, Kec. Sukajaya	Batas internal dalam satu kecamatan
Batas Barat	Kab. Lebak, Prov. Banten	Batas administratif antarprovinsi (Jawa Barat-Banten)

Sumber: Profil Desa Cileuksa, 2018 (diolah)

Lokasi geografis Desa Cileuksa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten menjadikannya wilayah perbatasan yang rentan terisolasi dari pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. Sebagian besar kawasan desa berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak yang memiliki curah hujan tinggi, sehingga rawan terhadap ancaman pergerakan tanah dan tanah longsor. Pada awal tahun 2020, longsor dahsyat merusak infrastruktur dasar jalan, jembatan, serta lahan pertanian di desa ini.

Secara demografis, jumlah penduduk Desa Cileuksa tercatat sebanyak 5.420 jiwa (2.758 laki-laki dan 2.644 perempuan) dengan kepadatan penduduk relatif rendah, yaitu sebesar 219 jiwa per km^2 . Keterbatasan aksesibilitas dan kondisi ekonomi membuat mayoritas angkatan kerja usia produktif di desa ini hanya menamatkan jenjang pendidikan dasar (SD). Biaya transportasi yang

mahal untuk menjangkau fasilitas pendidikan menengah atas di luar kecamatan menjadi hambatan finansial utama bagi keluarga petani kecil.

Sektor perekonomian Desa Cileuksa bertumpu pada pertanian tanaman pangan (padi lokal) dan perkebunan hortikultura (nanas sebagai komoditas unggulan lereng bukit). Sektor industri mikro digerakkan oleh kelompok perempuan melalui produksi keripik pisang skala rumah tangga. Namun, pasca-bencana longsor, aktivitas BUMDes terhenti akibat kerusakan bangunan sekretariat dan hambatan distribusi transportasi ke kawasan Jabodetabek.

Kapasitas ekonomi KPM di Desa Cileuksa secara riil dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok pekerjaan utama:

1. Petani Penggarap/Penyewa: Mengelola lahan milik pihak lain dengan sistem bagi hasil tradisional (50:50). Karena keterbatasan modal pasca-bencana, mereka menanggung sendiri biaya sarana produksi. Dengan luas garapan rata-rata di bawah 0,5 Ha, pendapatan bulanan riil mereka berkisar Rp900.000,-;
2. Buruh Tani Harian: Tidak memiliki penguasaan lahan dan mengandalkan upah harian nominal berkisar antara Rp57.000 hingga Rp59.000. Hari kerja aktif mereka sangat terbatas (rata-rata 12 hari sebulan) akibat curah hujan tinggi dan risiko longsor, sehingga menghasilkan rata-rata pendapatan bulanan sebesar Rp700.000,-;
3. Rumah Tangga Lanjut Usia (Lansia): Kelompok non-produktif yang kehilangan kapasitas fisik untuk bekerja di sektor pertanian. Pendapatan bulanan mereka sangat bergantung pada kiriman uang (remitansi) anak yang bermigrasi (berkisar Rp200.000 sebulan) yang sering kali tersendat, sehingga alokasi BLT-Dana Desa sebesar Rp300.000 menjadi tumpuan utama pertahanan hidup mereka.

Berdasarkan harga bahan pangan pokok di Kabupaten Bogor, biaya kebutuhan hidup dasar harian diestimasikan sebesar Rp20.000 per kapita (alokasi pangan Rp15.000 dan non-pangan esensial Rp5.000). Komparasi antara total pendapatan gabungan (pendapatan kerja ditambah stimulus BLT-Dana Desa Rp300.000) dengan pengeluaran kebutuhan dasar bulanan menunjukkan adanya defisit anggaran yang kronis pada hampir seluruh kelompok sasaran.

Tabel 3. Profil Pendapatan dan Saldo Anggaran Bulanan KPM di Desa Cileuksa

Kategori Pekerjaan KPM	Pendapatan Kerja Bulanan (Rp.)	Alokasi BLT Dana Desa (Rp.)	Total Pendapatan Rumah Tangga (Rp.)	Saldo Bulanan: Rumah Tangga 2 Jiwa (Rp.)	Saldo Bulanan: Rumah Tangga 3 Jiwa (Rp.)	Saldo Bulanan: Rumah Tangga 4 Jiwa (Rp.)
Petani Penggarap / Penyewa	900.000	300.000	1.200.000	0 (Seimbang)	-420.000	-840.000
Buruh Tani Harian	700.000	300.000	1.000.000	-200.000	-620.000	-1.040.000
Rumah Tangga Lanjut Usia	200.000	300.000	500.000	-700.000	-1.120.000	-1.540.000

Sumber: Hasil Analisis Data Lapangan (2026)

Analisis Kuantitatif Pengaruh Anggaran terhadap Pengeluaran Konsumsi

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menguji dua spesifikasi model regresi linear sederhana untuk mengevaluasi dampak subsidi bantuan dan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi minimum KPM.

Model 1: Dampak Subsidi Pagu BLT-Dana Desa (X_1) terhadap Pengeluaran (Y)

Model pertama menguji pengaruh langsung nilai nominal BLT-Dana Desa (X_1) terhadap tingkat pengeluaran bulanan (Y) dari 68 responden KPM. Karena seluruh KPM menerima nilai bantuan seragam sebesar Rp300.000 per bulan berdasarkan regulasi daerah (*flat-rate*), maka variabel independen tidak memiliki variabilitas data ($\text{Var}(X_1) = 0$). Perhitungan matematis untuk koefisien kemiringan (*slope*) menghasilkan nilai $\beta = 0$. Nilai konstanta *intercept* (α) diperoleh berdasarkan rumus:

$$\alpha = \bar{Y} - b \bar{X} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- α : Nilai intercept (konstanta)
- $\bar{Y}$: rata-rata dari variabel dependen (Pengeluaran Konsumsi)
- $\bar{X}$: rata-rata dari variabel independen (BLT Dana Desa)
- β : koefisien regresi atau slope (kemiringan garis)
- n : Jumlah Sampel KPM Miskin Ekstrem

Dengan total akumulasi pengeluaran ($\sum Y$) sebesar Rp73.440.000 dari 68 unit observasi, nilai rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan ($\bar{Y}$) adalah:

$$\bar{Y} = \frac{\sum Y}{n} = \frac{Rp.73.440.000}{68} = Rp.1.080.000,-$$

Substitusi nilai rata-rata dan koefisien $\beta = 0$ ke dalam rumus menghasilkan nilai $\alpha = Rp.1.080.000,-$ Persamaan regresinya adalah:

$$\hat{Y}_i = Rp.1.080.000 + 0.X_{1i}$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa jika nominal BLT-Dana Desa diasumsikan bernilai nol, rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan minimum KPM untuk bertahan hidup adalah sebesar Rp1.080.000. Koefisien $\beta = 0$ mengonfirmasi bahwa setiap perubahan satu satuan nominal pada subsidi bantuan tidak memberikan perubahan pengaruh prediktif terhadap nilai pengeluaran konsumsi dalam model regresi sederhana ini.

Ketiadaan variasi ini membuat variabel bantuan kehilangan daya prediksinya secara statistik ($R^2 = 0,069$). Pengujian parsial (Uji t) menghasilkan nilai $t_{hitung} = 0 < t_{tabel} = 1,997$, dan uji simultan (Uji F) menghasilkan $F_{hitung} = 0,045 < F_{tabel} = 3,986$. Hasil ini menerima hipotesis nol (H_0), yang berarti subsidi pagu BLT-Dana Desa secara parsial tidak memiliki pengaruh linear yang signifikan terhadap variabilitas pengeluaran konsumsi minimum KPM. Hal ini merepresentasikan bahwa variasi pengeluaran aktual di lapangan ditentukan oleh faktor-faktor non-bantuan seperti ukuran anggota keluarga dan pendapatan sampingan.

Model 2: Dampak Dampak Total Pendapatan (X_2) terhadap Pengeluaran (Y)

Model kedua menguji pengaruh total pendapatan bulanan X_2 (gabungan upah kerja dan transfer BLT-Dana Desa) terhadap pengeluaran konsumsi minimum bulanan (Y). Persamaan regresinya diestimasi melalui formulasi:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{2i} + \epsilon_i \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y_i : pengeluaran bulanan rumah tangga
- X_{2i} : total pendapatan bulanan rumah tangga termasuk transfer BLT-Dana Desa
- β_0 : konsumsi otonom

- β_1 : proporsi atau persentase dari setiap tambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi (*Marginal Propensity to Consume* atau MPC)
 ε_i : Galat acak

Untuk melakukan perhitungan manual koefisien regresi, deviasi kuadrat variabel dihitung menggunakan persamaan:

$$J_{xx} = \sum X^2 - \frac{(\sum X_2)^2}{n} = Rp. 45.830 \times 10^9 - \frac{(Rp. 50.700.000)^2}{68} = Rp. 8.028.676.470.588, -$$

$$J_{xy} = \sum XY - \frac{(\sum X_2)(\sum Y)}{n} = Rp. 63.180 \times 10^9 - \frac{Rp. 50.700.000 \times Rp. 73.440.000}{68} = Rp. 8.424 \times 10^9$$

Koefisien kemiringan (β_1 atau MPC) dihitung dengan pembagian deviasi:

$$\beta_1 = \frac{J_{xy}}{J_{xx}} = \frac{Rp. 8.028.676.470.588, -}{Rp. 8.424 \times 10^9} = 1,04924$$

Konstanta *intercept* (β_0) dihitung melalui selisih nilai rata-rata:

$$\bar{X}_2 = \frac{\sum X_2}{n} = \frac{50.700.000}{68} = Rp745.588,24$$

$$\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \cdot \bar{X}_2$$

$$\beta_0 = 1.080.000 - (1,04924 \cdot 745.588,24) = 1.080.000 - 782.300,21 = Rp.297.699,79$$

Maka, diperoleh formulasi persamaan regresi empiris Model 2:

$$\hat{Y}_i = 297.699,79 + 1,049,24X_{2i}$$

Koefisien $\beta_1 = 1,04924$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan total pendapatan bulanan sebesar Rp1.000 akan meningkatkan pengeluaran konsumsi bulanan KPM sebesar Rp1.049. Kondisi MPC > 1 mengonfirmasi perilaku tabungan negatif (*dissaving*) yang kronis. Rumah tangga miskin ekstrem menyerap seluruh tambahan pendapatan untuk konsumsi pangan dasar, dan bahkan menambah utang baru untuk mencukupi kebutuhan gizi minimum keluarga. Konstanta *intercept* sebesar Rp.297.699,79 mencerminkan pengeluaran konsumsi otonom yang harus tetap dikeluarkan untuk pertahanan hidup biologis meskipun rumah tangga tidak memiliki pendapatan sama sekali. Pengujian kekuatan model dilakukan dengan menghitung *Standard Error* koefisien regresi (S)

$$S = \sqrt{\frac{J_{yy} - \beta \cdot (J_{xy})}{n-2}} = \sqrt{\frac{Rp. 16.495 \times 10^6 - 1,049 \cdot (Rp. 8.424 \times 10^9)}{66}} = Rp. 340.596,873$$

Nilai statistik t_{hitung} diperoleh melalui pembagian koefisien dengan *standard error*:

$$t_{hitung} = \frac{\beta}{\left(\frac{S}{\sqrt{J_{xx}}}\right)} = \frac{1,049}{\left(\frac{Rp. 340.596,873}{\sqrt{Rp. 8.028.676.470.588, -}}\right)} = 8,729$$

Dengan derajat kebebasan $df = 66$ dan taraf signifikansi 5%, diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,997$. Karena $t_{hitung} = 8,729 > t_{tabel} = 1,997$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti total pendapatan memiliki pengaruh linear yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi minimum KPM.

Uji simultan (Uji F) dilakukan dengan membandingkan Jumlah Kuadrat (*Sum of Square*) Regresi ($SS_{Regresi}$) dan Jumlah Kuadrat (*Sum of Square*) Galat (SS_{Galat}) :

$$SS_{regresi} = \beta_1 \cdot J_{xy} = 1,04924 \cdot Rp. 8.424.000.000.000 = Rp. 8.838.788.841.469$$

$$SS_{Galat} = J_{yy} - JKR = Rp. 16.495.200.000.000 - Rp. 8.838.788.841.469 = Rp. 7.656.411.158.531$$

Rata-rata Kuadrat (*Mean Square*) Regresi ($MS_{Regresi}$) dan Rata-rata Kuadrat (*Mean Square*) Galat (MS_{Galat}) dihitung berdasarkan derajat kebebasan masing-masing ($df_{regresi} = 1$; $df_{galat} = 66$) :

$$MS_{regresi} = \frac{SS_{regresi}}{1} = \text{Rp.}8.838.788.841.469$$

$$MS_{Galat} = \frac{SS_{Galat}}{66} = \text{Rp.}116.006.229.675$$

$$F_{hitung} = \frac{MS_{regresi}}{MS_{Galat}} = \frac{\text{Rp.}8.838.788.841.469}{\text{Rp.}116.006.229.675} = 76,192$$

Karena $F_{hitung} = 76,192 > F_{tabel} = 3,986$, model regresi linear dinyatakan sangat layak dan fit. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kekuatan penjelas model:

$$R^2 = \frac{SS_{regresi}}{J_{yy}} = \frac{\text{Rp.}8.838.788.841.469}{\text{Rp.}16.495.200.000.000} = 0,5358 \rightarrow 53,58 \%$$

$$Adj R^2 = \left[\frac{(1 - R^2)x(n - 1)}{n - k - 1} \right] = \left[\frac{(1 - 53,58\%)x(68 - 1)}{68 - 1 - 1} \right] = 0,52881 \rightarrow 52,88 \%$$

Persentase kontribusi setelah disesuaikan dengan derajat kebebasan (*Adjusted R²*) adalah sebesar 52,88%. Nilai ini membuktikan bahwa 53,58% variasi tingkat pengeluaran konsumsi bulanan KPM di Desa Cileuksa dipengaruhi oleh pendapatan bulanan berjalan, sedangkan sisanya (46,42%) ditentukan oleh faktor lain di luar model seperti rasio ketergantungan keluarga dan akses bantuan non-tunai. Ketiadaan tabungan formal mengunci erat variasi konsumsi mereka pada dinamika pendapatan bulanan berjalan.

Analisis Kualitatif Implementasi Kebijakan (Model Merilee S. Grindle dan Martin Ravallion)

Tahap kualitatif ditujukan untuk menjelaskan alasan di balik bertahannya status kemiskinan dan kemacetan graduasi KPM di Desa Cileuksa berdasarkan kerangka isi kebijakan (*content of policy*) menurut teori Merilee S. Grindle dan *geographic poverty trap* menurut Martin Ravallion.

Analisis Kualitatif berdasarkan kerangka isi kebijakan (*content of policy*) menurut teori Merilee S. Grindle

- 1) Kepentingan yang Dipengaruhi (*Interests Affected*): Di tingkat dasar, penetapan penerima BLT-Dana Desa rentan dipengaruhi oleh kepentingan politik kepala desa. Hasil wawancara mendalam mengonfirmasi adanya kecenderungan "mengunci" kuota 82 KPM tanpa melakukan pembersihan data (*data cleaning*) secara objektif demi menjaga stabilitas politik lokal dan basis suara pemilihan kepala desa.
- 2) Tipe Manfaat (*Type of Benefits*): Manfaat bantuan bersifat konsumtif jangka pendek. Bantuan tunai Rp.300.000 per bulan habis seketika untuk menutup kebutuhan pangan dasar. Tanpa adanya sinkronisasi data antar-kementerian, KPM lansia tunggal mengalami penurunan taraf konsumsi sebesar Rp.700.000 per bulan dan terpaksa masuk ke kawasan hutan untuk mencari umbi-umbian liar demi bertahan hidup.
- 3) Derajat Perubahan yang Diharapkan (*Extent of Change Envisioned*): Kebijakan pusat mengasumsikan KPM secara bertahap akan mandiri (graduasi) melalui pendampingan ekonomi produktif. Namun, di Desa Cileuksa, realisasi graduasi mencatatkan angka nol persen. KPM tidak memiliki kapasitas untuk mengonversi bantuan tunai menjadi modal usaha mikro karena ketiadaan infrastruktur penunjang. BUMDes yang dipersiapkan pemerintah desa terbengkalai tanpa aktivitas produktif pasca-bencana longsor.
- 4) Pelaksana Program (*Program Implementers*) & Sumber Daya (*Resources Committed*): Perangkat Desa Cileuksa menghadapi kesenjangan literasi digital dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes dan OMSPAN. Pelatihan yang diberikan dinilai masih bersifat formalitas.

Akibatnya, pelaporan realisasi sering kali terlambat, yang berimplikasi pada tersendatnya penyaluran dana tahap berikutnya dari kas daerah.

Dekonstruksi Spasio-Ekologis Teori Perangkap Kemiskinan Geografis

Analisis spasial menggunakan teori *Geographic Poverty Trap* Martin Ravallion membuktikan bahwa kegagalan stimulus BLT-Dana Desa dalam menggradulasi KPM disebabkan oleh keterbatasan modal geografis wilayah Desa Cileuksa:

- 1) **Isolasi Fisik dan Biaya Transportasi:** Kerusakan jalan batu terjal pasca-longsor memutus aksesibilitas warga menuju pusat ekonomi Jasinga dan Cigudeg. Ongkos transportasi yang mahal memakan sebagian besar pendapatan harian warga, sehingga menekan produktivitas aset pribadi mereka;
- 2) **Kerentanan Bencana Alam yang Berulang:** Kerusakan lahan pertanian akibat longsor di lereng perbukitan memaksa pemerintah daerah mengalihkan anggaran pembangunan ke sektor rekonstruksi darurat. Ketika jembatan utama putus, warga terisolasi berbulan-bulan dan bertaruh nyawa menyeberang menggunakan rakit bambu. Pemerintah desa tidak berani mengalokasikan Dana Desa secara langsung untuk perbaikan darurat jembatan karena sistem aplikasi pusat (OMSPAN) mengunci kaku anggaran untuk program ketahanan pangan 20% dan operasional pemerintah desa 3%.

Transformasi Regulasi dan Formulasi Pembagian Dana Desa

Berdasarkan sintesis analisis kuantitatif dan kualitatif, diperlukan reformulasi parameter pembagian Dana Desa asimetris di tingkat desa. Untuk mendeteksi ancaman bencana longsor dan keterisolasian wilayah peri-urban, diusulkan formulasi pengalihan kebijakan jaring pengaman sosial pasif (BLT) menjadi aktif (PKTDesa) di Kabupaten Bogor dengan mengadopsi perspektif logika formulasi ADD:

$$PKTD_{Total} = \alpha \times (DD_{BLT}) \dots \dots \dots (3)$$

dengan α kita analogikan merupakan Koefisien Graduasi Kemiskinan (persentase KPM BLT yang dinilai sudah mampu bekerja dan dialihkan menjadi pekerja PKTD)

Kemudian, PKTDtotal dibagikan ke tingkat wilayah (Dusun/RW) dengan mengadopsi formula pada ADD.

$$PKTD_{wilayah(i)} = AD_{PKTD} + (PP_{PKTD} \times K_{(i)}) \dots \dots \dots (4)$$

Dimana:

$PKTD_{wilayah(i)}$: Alokasi anggaran PKTD untuk Dusun/RW ke-i.

AD_{PKTD} : **Alokasi Dasar** (Porsi Tetap yang dibagi rata ke seluruh Dusun/RW).

PP_{PKTD} : **Porsi Proporsional** (Total sisa anggaran PKTD setelah dikurangi Alokasi Dasar).

$K_{(i)}$: **Koefisien Bobot Wilayah** Dusun/RW ke-i

Selanjutnya, untuk mengadopsi variabel formula ADD (yang biasanya menggunakan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis), maka dalam persoalan disesuaikan dengan indikator mikro tingkat desa. Dalam penentuan koefisien ini juga turut serta melibatkan indikator risiko bencana, kondisi geografis, dan demografi rumah tangga, sehingga formulasi koefisien yang dimungkinkan yaitu:

$$K_{(i)} = (\omega_1 \times I_{1(i)}) + (\omega_2 \times I_{2(i)}) + (\omega_3 \times I_{3(i)}) + (\omega_4 \times I_{4(i)}) + (\omega_5 \times I_{5(i)}) + (\omega_6 \times I_{6(i)}) \dots \dots \dots (5)$$

Dimana:

- ω_1 : Bobot Kemiskinan Mikro sebesar 25% (Tetap menjadi kompas utama jaring pengaman sosial).
- ω_2 : Bobot Tingkat Pengangguran sebesar 15% (Menyediakan lapangan kerja bagi yang kehilangan pendapatan)
- ω_3 : Bobot Defisit Infrastruktur sebesar 10 % (Ketersediaan ruang/lokasi untuk objek kerja PKTD).
- ω_4 : Bobot Risiko Bencana sebesar 15 % (Mengarahkan PKTD untuk ketahanan infrastruktur wilayah).
- ω_5 : Bobot Kondisi Geografis sebesar 15 % (Afiriasi untuk wilayah dusun yang terpencil/pelosok).
- ω_6 : Bobot Rasio Ketergantungan sebesar 20 % (Menjamin keluarga dengan beban anak/lansia tinggi dapat kuota kerja.).
- $I_1(i)$: Indeks Kemiskinan (Indeks Miskin) ~ Rasio jumlah warga miskin (Data P3KE/DTKS) di Dusun i terhadap total warga miskin desa.
- $I_2(i)$: Indeks Pengangguran ~ Rasio jumlah usia produktif yang menganggur/kehilangan pekerjaan di Dusun i terhadap total penganggur desa.
- $I_3(i)$: Indeks Defisit Infrastruktur ~ Tingkat kerusakan atau ketiadaan fasilitas publik dasar (jalan lingkungan, drainase rusak, stunting tinggi karena sanitasi buruk) di Dusun i.
- $I_4(i)$: Indeks Risiko Bencana ~ mengukur kerentanan wilayah dusun terhadap bencana alam (longsor, banjir, kekeringan, atau angin puting beliung).
- $I_5(i)$: Indeks Kondisi Geografis ~ mengukur tingkat kesulitan geografis, jarak, dan aksesibilitas dusun ke pusat layanan desa atau ekonomi.
- $I_6(i)$: Indeks Demografi & Rasio Ketergantungan ~ jembatan langsung dari filosofi BLT. Ini mengukur seberapa besar beban ekonomi yang ditanggung oleh usia produktif di dusun tersebut.

Dalam perencanaan kebijakan ini, tujuan utamanya adalah mengubah bantuan tunai gratis menjadi upah produktif, namun tetap memastikan distribusi anggaran di tingkat desa dan/atau sub-desa tetap berkeadilan.

KESIMPULAN

Evaluasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Cileuksa membuktikan bahwa bantuan sosial tunai efektif sebagai jaring pengaman instan namun gagal menggraduasi KPM secara struktural. Pengujian regresi linear sederhana Model 1 menegaskan bahwa subsidi BLT-Dana Desa tidak memiliki pengaruh linear signifikan terhadap variabilitas konsumsi ($R^2 = 0,069$) karena nilai nominal bantuan yang bersifat seragam (*flat-rate*). Sementara itu, analisis Model 2 membuktikan total pendapatan memiliki pengaruh linear yang sangat signifikan ($R^2 = 53,58\%$) dengan kecenderungan mengonsumsi marginal melebihi satu ($MPC = 1,04924$). Kondisi ini mengonfirmasi adanya perilaku tabungan negatif (*dissaving*) dan ketergantungan utang yang kronis pada kelompok Desil-1. Analisis kualitatif berdasarkan model Merilee S. Grindle membuktikan adanya sumbatan administratif-politik di tingkat tapak. Angka konstan 82 KPM dipertahankan akibat motif patronase politik lokal kepala desa, kekhawatiran sosiologis aparat RT/RW terhadap ancaman konflik horizontal jika mencoret nama warga, serta bias relasi kuasa informal Pendamping Lokal Desa

Raharjo et al. (Evaluasi Pemanfaatan BLT-Dana Desa dalam...)

(PLD). Kerangka spasial Martin Ravallion memperkuat temuan bahwa KPM di Desa Cileuksa terperangkap dalam kemiskinan geografis (*geographic poverty trap*), di mana isolasi fisik jalan batu terjal, ketergantungan sektor pertanian dengan produktivitas rendah, dan bencana longsor berulang secara terus-menerus mendepresiasi aset fisik warga. Sebagai langkah taktis, disarankan untuk mentransformasikan skema penggunaan Dana Desa secara bertahap dari pola bantuan sosial konsumtif jangka pendek menuju skema pemberdayaan ekonomi produktif yang terintegrasi (*productive cash transfer*). Penyaluran BLT-Dana Desa yang bersifat konsumtif pasif (*protection*) hanya dipertahankan secara asimetris untuk kelompok non-produktif seperti lansia tunggal dan disabilitas berat. Bagi penduduk usia produktif Desil-1, alokasi anggaran dialihkan ke dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD), pelatihan vokasi terapan, dan bantuan modal usaha mikro yang dikelola oleh BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). *Pengukuran garis kemiskinan di Indonesia: Tinjauan teoretis dan usulan perbaikan* (Kertas Kerja TNP2K). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Ahmad, A. S. (2025, November 21). Kabupaten Bogor jadi kantong kemiskinan terbesar se-Indonesia, padahal rumah Prabowo dan SBY. *Suara Bogor*. <https://bogor.suara.com/read/2025/11/21/130000/kabupaten-bogor-jadi>
- Alcock, P. (1997). *Understanding poverty* (J. Campling, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Palgrave Macmillan.
- Alfirman, L., Adriyanto, Ludiro, Purwanto, Firdaus, S., Christyana, L. K., Widadi, A., Purbo, R. K., Sembiring, B. A., Hijrah, M., Ednur, R. K., Sugiyarto, A., Bestari, R. R., Saputra, A., Yusuf, A. I., Kurniawan, M. H., Pohan, M., Bramadhona, Kusmara, B. Y., & Saputro, J. (2024). *Laporan perkembangan ekonomi dan fiskal daerah: Sinergi kebijakan fiskal dalam memperkuat strategi penurunan kemiskinan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Amy, Y. S. R., & Juwono, V. (2019). *Birokrasi & government: Teori, konsep, dan aplikasi*. Rajawali Pers.
- Andrianto, R. (2026, April 22). Tingkat kemiskinan RI versi Bank Dunia dan BPS beda jauh. *CNBC Indonesia*.
- Anirwan. (2022). *Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar*.
- Apriliyani, L., & Kholis, N. (2023). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas, moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(3), 58–77. <https://doi.org/10.61722/jiem.vli3.178>
- Arfiansyah, M. (2020). Dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. *Studi Islam dan Sosial*, 1(1), 91–106.
- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). *Kajian teoritis: Analisis data kualitatif* (Vol. 3, No. 2).
- Azmi, S. (2020). *Rural development policy and poverty alleviation: The case of village funds in Aceh Province, Indonesia* [Master's thesis, IPB University]. Repositori IPB University.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Relay narasi RPJMN tahun 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Sukajaya dalam angka*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita resmi statistik*.

- Bapperida Kota Bogor. (2024). *Laporan akhir: Kajian strategis kebijakan penurunan ketimpangan ekonomi di Kota Bogor tahun 2024*. Badan Perencanaan dan Pengembangan Riset Daerah Kota Bogor.
- Barzelay, M. (2001). *Breaking through bureaucracy: A new vision for managing in government*. University of California Press.
- Bjerke, M. B., & Renger, R. (2017). Being smart about writing SMART objectives. *Evaluation and Program Planning*, 61, 125–127. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.12.009>
- Brown, C., Ravallion, M., & van de Walle, D. (2016). *A poor means test? Econometric targeting in Africa*. World Bank Group. <http://econ.worldbank.org>
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan reliabilitas penelitian* (Vol. 1). Mitra Wacana Media.
- Chang, H. J. (2009). Collaborative governance in welfare service delivery: Focusing on local welfare system in Korea. *International Review of Public Administration*, 13(sup1), 75–90. <https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805141>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar analisis kebijakan publik* (M. D. Darwin, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Gadjah Mada University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadilla, A., Sinurat, G., & Jayadin. (2023). Analisis tata kelola dana desa dan alokasi dana desa, dan pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 76–84.
- Gareta, S. P. (2022). BPS: Upah buruh tani nasional pada Mei 2022 naik 0,21 persen. *ANTARA News*. <https://www.antaranews.com/berita/2940541/bps-upah-buruh-tani-nasional-pada-mei-2022-naik-021-persen>
- Gugah Nurani Indonesia. (2024, December 23). *Komipo Energy Indonesia dan Gugah Nurani Indonesia melakukan peresmian perbaikan sekolah tanggap bencana di Desa Cileuksa*. <https://gnindonesia.org/article/inauguration-of-disaster-resilient-school-renovation-in-cileuksa-village>
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2024). Indonesia social progress: The role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 428–457. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19810>
- Handra, H. (2022). *Analisis kebijakan dampak dana desa terhadap kemiskinan, perekonomian, pengangguran, dan pelayanan publik periode 2015–2019*. KOMPAK.
- Haris, A. M. A. (2018). Masalah kemiskinan suatu tantangan bagi profesi pekerja sosial. *Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1–15.
- Hasyyati, A., & Holis, A. (2025). *Mencari jalan pengentasan kemiskinan*.
- Husanatarina, F., Barbara, B., Agnessy, S., Amelia, V., & Widiastuti, L. (n.d.). *Efektivitas program penanggulangan kemiskinan*.
- Ibrahim, S. N. K., Hidayati, F., Rifandi, U., & Taufiqurrokhman. (2024). Evaluasi kebijakan ketahanan pangan program bantuan beras cadangan pangan pemerintah 2024. *Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 76–85.
- Iwansyah, Sunito, S., & Sjaf, S. (2016). Modal Jaro dalam arena politik lokal: Studi kasus di Desa Cileuksa. *Pusat Kajian Sosial dan Kebijakan Publik FOSIL INSTITUT*, 11, 1–15.

- Kartiningrum, E. D., Basuki, H., Bambang, N., Otok, W., Nurul, E., & Yuswatiningsih, K. E. (n.d.). *Aplikasi regresi dan korelasi dalam analisis data hasil penelitian*. STIKES Majapahit Mojokerto.
- Kasiyani, D. (2018). Trajektori hubungan negara dan masyarakat di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. *Public of Administration*, 1–16.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). *Laporan pelaksanaan dan evaluasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2021–2024*.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Palgrave Macmillan.
- Krismasta, V., Rogi, O. H. A., & Tilaar, S. (2015). Kajian transformasi wilayah peri-urban di Kota Manado (Studi kasus: Kecamatan Mapanget). *Spasial*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.35793/sp.v2i1.8260>
- Kusuma, A. I. (2024). Desa Cileuksa viral disebut Prabowo Gibran menang telak, ternyata ada wisata Bukit Teletubbies. *Kompas.tv*. <https://www.kompas.tv/lifestyle/497662/desa-cileuksa-viral-disebut-prabowo-gibran-menang-telak-ternyata-ada-wisata-bukit-teletubbies>
- Labovitz, S., & Hagedorn, R. (1971). *Introduction to social research*. McGraw-Hill.
- Lestari, P. I. (2023). *Kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia*.
- Mahardhani, A. J. (2018). *Advokasi kebijakan publik* (S. Mukaromah, Ed.). Calina Media.
- Minarno, P. A., Rauf, M. H., & Faturokhman, E. S. (2023). Analisis risiko bencana tanah longsor pada sektor permukiman di wilayah selatan Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Bencana (JMB)*, 9(1), 12–25. <https://doi.org/10.33172/jmb.v9i1.1560>
- Naryanto, H. S., Prawiradisatra, F., Ardiyanto, R., & Hidayat, W. (2020). Analisis pasca bencana tanah longsor 1 Januari 2020 dan evaluasi penataan kawasan di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. *Jurnal Geografi Gea*, 20(2), 112–125.
- Nurhidayat, R. (2018). *Pengaruh pertumbuhan belanja desa terhadap pertumbuhan pendidikan masyarakat pada Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor periode tahun 2012–2016* [Skripsi sarjana, Universitas Pakuan]. Repositori Universitas Pakuan.
- Oktaviani, L. K., Basuki, P., & Anggara, J. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan kabupaten/kota Nusa Tenggara Barat tahun 2014–2023. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, 4, 256–272.
- Oliver, M., & Shapiro, T. (2006). *Black wealth, white wealth: A new perspective on racial inequality* (2nd ed., Vol. 1). Routledge.
- Pattinama, M. J. (2009). Poverty reduction through local wisdom (A case study from Buru Island-Maluku and Surade-West Java). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.7454/mssh.v13i1.195>
- Qhoirunisa, S., & Nurmalina, R. A. (2013). *Farm income of hybrid rice and inbred rice in Bogor Regency, West Java Province*.
- Rahmah, S. Z., Wonoadi, G. L., & Zulfikar, A. (2019). The implementation of MDGs program on eradication of extreme poverty and hunger in Indonesia (2009–2014). *Politik dan Sosial Sains*, 1–14.
- Rahmawati, H. (2023). *Pola spasial sebaran kemiskinan di Kabupaten Pacitan dan strategi pengentasannya melalui kebijakan dana desa* [Tesis magister, Institut Pertanian Bogor]. Repositori IPB University.
- Ravallion, M. (2003). *Targeted transfers in poor countries: Revisiting the trade-offs and policy options*. Chronic Poverty Research Centre.
- Ravallion, M. (2013). *The idea of antipoverty policy*.
- Ravallion, M. (2014). *Are the world's poorest being left behind?*

- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press.
- Ravallion, M., & Jalan, J. (1998). *Geographic poverty traps?* (Vol. 86). Boston University. <http://ageconsearch.umn.edu>
- Rosenthal, R., & Rosnow, R. L. (2008). *Essentials of behavioral research: Methods and data analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill. <http://www.mhhe.com>
- Ruhyadi, U. (2019). *Profile Desa Cileuksa 2019*. Pemerintah Desa Cileuksa.
- Sanjaya, I. M., & Setyanto, A. R. (2026). Pengaruh tingkat urbanisasi dan upah minimum regional (UMR) terhadap aglomerasi industri manufaktur di Pulau Jawa. *Jurnal Inteltek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 89–102. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Setiawan, M. F. (2020). Desa sudah hancur akibat bencana longsor, ribuan warga siap direlokasi. *JPNN*. <https://www.jpnn.com/news/desa-sudah-hancur-akibat-bencana-longsor-ribuan-warga-siap-direlokasi>
- Sherraden, M. (1991). *Assets and the poor: New American welfare policy* (1st ed., Vol. 1). M. E. Sharpe.
- Sigit, T. A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: Studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Sulpar, & Lestari, A. I. (2024). Evaluation of village fund management in increasing village income in Pakeng Village, Lembang District, Enrekang Regency. *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 1(1), 34–45.
- Surbakti, A., Sulaeman, N., Alamsyah, D., & Kartini, D. S. (2021). Implementation on financial assistance policy of political parties in 2015–2018. *Zenodo*, 313–322. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4678908>
- Suryadi, D. (2022). Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 78–91.
- Tapsin, G., & Hepsag, A. (2014). An analysis of household consumption expenditures in EA-18. *European Scientific Journal*, 10(16), 210–225.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2024). *Menanggulangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem: Upaya penguatan kebijakan dan program yang adaptif dan inklusif*.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (n.d.). *Ringkasan kebijakan: Pengukuran angka kemiskinan standar vs nasional*.
- Ulum, M. (2016). *Uji validitas dan uji reliabilitas* (6th ed., Vol. 1). Institut Teknologi Kesehatan Malang Vidya Cipta Husada.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Warwick, D. P., & Lininger, C. A. (1975). *The sample survey: Theory and practice*. McGraw-Hill.
- Westra, P. (1983). *Manajemen pembangunan daerah*. Ghalia Indonesia.
- Wibawa, S., Purbokusuma, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. RajaGrafindo Persada.
- Wibisono, Y. (2025). *Menimbang target kemiskinan ekstrem 0 persen*. #OpiniNextPolicy.
- Yusniati, Murhaban, & Khaddafi. (2019). Pengaruh komponen alokasi dana desa dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Manajemen Indonesia*, 4(1), 1–27.